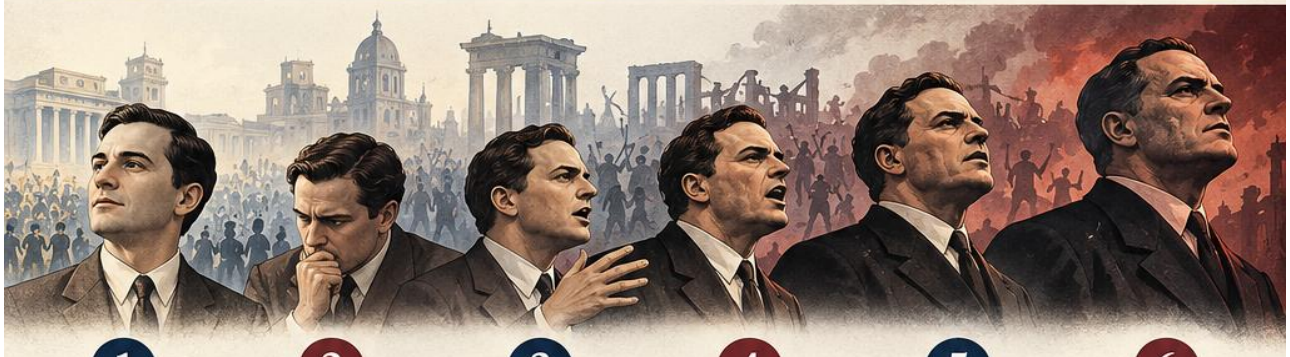
Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD
Bagaimana Genesis Fasisme: Perkembangan Seorang Pemimpin yang Awalnya Tampak Normal Menjadi Fasis

BAGAIMANA GENESIS FASISME?

Perkembangan seorang pemimpin yang awalnya tampak normal menjadi fasis



1 KRISIS & KETIDAKPASTIAN



Perang, gejolak ekonomi, dan lemahnya kepercayaan pada pemerintah

2 NARASI KEMEROSOTAN



Bangsa digambarkan dipermalukan dan dikhianati

3 JANJI PEMULIHAN



Pemimpin menjanjikan persatuan, ketertiban, dan kebangkitan nasional

4 GERAKAN & KEKERASAN



Organisasi massa mengubah kemarahan menjadi mobilisasi; kekerasan terhadap lawan dinormalisasi

5 ALIANSI ELITE



Aktor mapan membuka akses kekuasaan karena mengira pemimpin radikal dapat dikendalikan

6 PEREBUTAN NEGARA



Jabatan dan aturan dipakai untuk melemahkan oposisi serta pembatas demokratis

INTI ANALISIS

Fasisme bukan sekadar perubahan watak seorang pemimpin. Ia tumbuh dari pertemuan ambisi, krisis, organisasi militan, toleransi terhadap kekerasan, dan dukungan elite.

'Awalnya normal' berarti berawal sebagai aktor politik biasa—bukan diagnosis klinis.

PENGUNCI DEMOKRASI

- hukum ditegakkan setara
- oposisi dilindungi
- media dan lembaga independen
- elite menolak kekerasan politik

Kasus utama: Italia (Mussolini); pembanding: Jerman (Hitler). Jalur sejarah berbeda, mekanisme dapat dibandingkan.

Oleh: Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD
www.rudyct.com/cv.pdf
Guru Besar Manajemen dan AI Data Analyst | IBM-ASMI
RudyCT Academic Series

Bagaimana Genesis Fasisme: Perkembangan Seorang Pemimpin yang Awalnya Tampak Normal Menjadi Fasis

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD
www.rudyct.com/cv.pdf

IBM-ASMI | RudyCT Academic Series

Naskah akademik | 26 Oktober 2026

Abstrak

Artikel ini menguraikan genesis fasisme sebagai proses politik, sosial, dan kelembagaan, bukan sebagai akibat langsung dari watak patologis seorang pemimpin. Ungkapan "pemimpin yang awalnya normal menjadi fasis" digunakan sebagai pertanyaan analitis: bagaimana seorang aktor yang mula-mula beroperasi di dalam politik biasa dapat mengadopsi nasionalisme eksklusif, kultus persatuan dan pemimpin, pembenaran kekerasan, serta penolakan terhadap pluralisme dan pembatasan konstitusional? Dengan mengutamakan pengalaman Italia dan membandingkannya secara terbatas dengan Jerman, artikel menelusuri krisis pascaperang, ketakutan terhadap revolusi sosial, pembentukan gerakan paramiliter, daya tarik mitos pemulihan bangsa, kerja sama dengan elite konservatif, pemanfaatan prosedur legal, dan penghancuran bertahap atas institusi demokratis. Perspektif psikologi politik dipakai untuk menjelaskan bagaimana ancaman, identitas kelompok, kepatuhan, dan imbalan kekuasaan dapat mengubah pilihan politik, tetapi

tidak diperlakukan sebagai diagnosis klinis. Kesimpulan utama ialah bahwa fasisme lahir dari pertautan antara aspirasi pribadi, organisasi militan, emosi massa, krisis legitimasi, normalisasi kekerasan, dan keputusan elite yang mengira pemimpin radikal dapat dikendalikan. Pemahaman prosesual ini membantu membedakan fasisme historis dari sekadar autoritarianisme atau populisme, sekaligus mengidentifikasi kondisi yang membuat demokrasi rentan.

Kata Kunci

fasisme; Mussolini; Hitler; psikologi politik; krisis demokrasi; kekerasan politik; elite; autoritarianisme; nasionalisme eksklusif; institusi

1. Pendahuluan: Mengapa Pertanyaan tentang "Genesis" Penting

Pertanyaan "bagaimana genesis fasisme?" mengundang dua persoalan yang perlu dibedakan. Pertama, bagaimana suatu gerakan dan rezim fasis muncul dalam sejarah? Kedua, bagaimana seorang pemimpin yang pada awal kariernya tampak seperti aktor politik biasa bergerak menuju praktik dan ideologi fasis? Kedua persoalan berhubungan, tetapi tidak identik. Riwayat pribadi seorang pemimpin tidak dapat menggantikan analisis terhadap organisasi, masyarakat, negara, dan koalisi yang memungkinkan gerakan itu bertumbuh. Sebaliknya, struktur sosial juga tidak bekerja sendiri: manusia membuat pilihan, membangun organisasi, menafsirkan krisis, dan memutuskan apakah kekerasan boleh digunakan.

Kata "normal" dalam judul tidak berarti bahwa seorang pemimpin pernah menjalani pemeriksaan klinis dan terbukti sehat, atau bahwa perilakunya dapat disimpulkan dari satu label psikologis. Dalam kehidupan politik, "normal" lebih tepat berarti seseorang yang pada awalnya bergerak melalui saluran politik yang dikenal: menjadi jurnalis atau organisator, mengikuti

kompetisi partai, berpidato, menggalang dukungan, bernegosiasi, dan berusaha memperoleh jabatan. Peralihan menuju fasisme tidak selalu tampak sebagai perubahan kepribadian mendadak. Ia sering berlangsung sebagai rangkaian keputusan yang pada tiap tahap dibenarkan sebagai respons pragmatis terhadap ancaman, kekalahan, atau kesempatan. Pemimpin dapat mengubah keyakinan, tetapi dapat pula menyesuaikan retorika demi koalisi dan kekuasaan. Karena itu, kita perlu memeriksa baik perubahan keyakinan maupun perubahan perilaku dan institusi.

Sejarah Italia setelah Perang Dunia I memberi contoh penting. Benito Mussolini pernah menjadi aktivis dan jurnalis sosialis sebelum menjadi pendiri gerakan fasis. Perjalanannya tidak dapat dijelaskan dengan cerita sederhana tentang seorang sosialis yang tiba-tiba "berubah jahat". Ia mengalami konflik mengenai intervensi Italia dalam perang, dikeluarkan dari Partai Sosialis, membangun jaringan politik baru, lalu memanfaatkan nasionalisme veteran, kecemasan pemilik tanah dan pengusaha, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan parlementer. Kekerasan pasukan fasis, toleransi sebagian aparat, dan dukungan elite konservatif menjadi unsur yang sama pentingnya dengan ambisi Mussolini (Elazar, 2000; Gentile, 2012; Paxton, 1998).

Kasus Jerman menunjukkan jalur yang beririsan namun berbeda. Adolf Hitler tidak mengambil alih negara melalui satu "kudeta" sederhana yang langsung berhasil. Partai Nazi membangun organisasi massa, memperoleh dukungan elektoral dalam kondisi krisis Republik Weimar, lalu masuk ke pemerintahan melalui keputusan elite yang mengira Hitler dapat dibatasi oleh kabinet dan aturan lama. Setelah diangkat sebagai kanselir pada Januari 1933, rezimnya menghancurkan oposisi dan mengubah negara demokratis menjadi kediktatoran. Sejarah ini mengingatkan bahwa pemilu dapat menjadi pintu masuk bagi kekuatan yang kemudian menghapus persaingan bebas, tetapi

kemenangan pemilu saja bukan penjelasan yang cukup bagi kehancuran demokrasi.

Artikel ini mengajukan tesis bahwa seorang pemimpin tidak "menjadi fasis" melalui satu penyebab tunggal. Genesis berlangsung ketika lima dinamika saling menguatkan: (1) krisis yang dirasakan sebagai ancaman eksistensial; (2) nasionalisme mitologis yang menjanjikan kelahiran kembali komunitas; (3) organisasi yang mengubah kemarahan menjadi disiplin dan kekerasan; (4) elite yang membuka akses kepada negara; dan (5) penghancuran bertahap terhadap aturan yang menghambat pemusatan kuasa. Dalam proses itu, pemimpin dapat berkembang menjadi fasis secara ideologis, secara strategis, atau melalui gabungan keduanya. Perbedaan tersebut penting karena penilaian atas keyakinan pribadi dan konsekuensi tindakan politik memerlukan bukti yang berbeda.

Pembahasan disusun secara historis-komparatif dan konseptual. Italia menjadi pusat uraian karena gerakan Mussolini memberi nama bagi fasisme modern dan memperlihatkan bagaimana gerakan paramiliter memperoleh kuasa dengan bantuan aktor mapan. Jerman dipakai sebagai pembanding, bukan sebagai salinan Italia. Literatur tentang definisi fasisme, tahap perkembangan gerakan, kekerasan, hubungan kelas dan negara, serta psikologi politik digunakan untuk memperjelas mekanisme. Artikel ini tidak menganggap semua nasionalisme, konservatisme, populisme, atau pemerintahan otoriter sebagai fasisme. Analisis yang cermat harus menguji kombinasi gagasan dan praktik, bukan hanya menggunakan istilah tersebut sebagai cercaan politik (Passmore, 2021).

2. Apa yang Dimaksud dengan Fasisme?

Tidak ada definisi fasisme yang diterima secara universal. Perdebatan itu bukan kelemahan yang harus ditutupi, melainkan bagian dari masalah analitis:

gerakan fasis sering mengutamakan aksi, mitos, simbol, dan mobilisasi daripada doktrin yang koheren. Program mereka dapat berubah mengikuti keadaan, sementara tema tertentu terus muncul, yaitu kemerosotan bangsa, pengkhianatan internal, kebutuhan akan persatuan, pemujaan terhadap kekuatan, dan janji pembaruan melalui perjuangan.

Roger Griffin (1991) menekankan ultranasionalisme populis yang berorientasi pada mitos kelahiran kembali bangsa. Dalam pandangan ini, fasisme menggambarkan bangsa sebagai komunitas yang telah dilemahkan atau dipermalukan, lalu menjanjikan regenerasi melalui mobilisasi kolektif. Robert Paxton (1998, 2004) menggeser perhatian dari daftar doktrin menuju perilaku politik dan proses. Fasisme tumbuh melalui gerakan yang menempatkan kemerosotan, penghinaan, dan korban kolektif sebagai pusat politik; membangun kultus persatuan, energi, dan kemurnian; berkolaborasi secara tegang tetapi efektif dengan elite tradisional; kemudian meninggalkan kebebasan demokratis dan menggunakan kekerasan tanpa batas moral atau hukum untuk mencapai tujuan nasional.

Kedua pendekatan saling melengkapi. Gagasan "kelahiran kembali" menerangkan daya tarik emosional proyek fasis, sedangkan pendekatan prosesual menerangkan bagaimana proyek itu mengubah dirinya menjadi kekuasaan negara. Fasisme bukan sekadar otoritarianisme karena ia berusaha memobilisasi masyarakat secara aktif, membentuk manusia baru, dan mengarahkan kehidupan publik kepada tujuan nasional yang menyeluruh. Ia bukan sekadar konservatisme karena, sekalipun sering bersekutu dengan kelompok konservatif, ia membawa energi revolusioner untuk merombak tatanan, mengorganisasi massa, dan menghapus pluralisme. Ia juga tidak identik dengan populisme, walaupun retorika "rakyat sejati" versus "elite pengkhianat" dapat digunakan gerakan fasis.

Sebagai perangkat kerja, artikel ini mengenali kecenderungan fasis melalui gabungan indikator berikut: nasionalisme yang mengklaim hak istimewa bagi suatu komunitas; narasi kemerosotan dan pemulihan; definisi eksklusif tentang siapa yang sungguh-sungguh termasuk bangsa; organisasi massa yang berpusat pada pemimpin; penerimaan atau pemuliaan kekerasan politik; permusuhan terhadap pluralisme dan oposisi; serta usaha menundukkan lembaga negara dan masyarakat sipil kepada proyek nasional. Tidak setiap unsur harus muncul secara identik dalam semua kasus. Yang perlu diuji adalah konfigurasi, fungsi, dan urutannya.

Definisi ini mencegah dua kesalahan. Pertama, menyebut setiap pemimpin keras atau setiap kebijakan nasionalis sebagai fasis. Kedua, mensyaratkan salinan persis Italia 1922 atau Jerman 1933 sehingga bentuk baru yang berbeda tidak dapat dianalisis. Seperti disarankan Paxton (1998), gerakan dan rezim harus dibandingkan pada tahap yang sepadan. Sebuah kelompok bisa memiliki ciri fasis tanpa pernah merebut negara; sebaliknya, suatu rezim dapat menjadi otoriter tanpa memenuhi seluruh karakter fasis.

Istilah fasisme juga harus digunakan secara bertanggung jawab. Ia memiliki makna sejarah yang spesifik dan membawa beban moral sangat berat. Penggunaan yang tidak teliti mengaburkan perbedaan antara konservatisme demokratis, otoritarianisme, populisme, nasionalisme, dan fasisme. Analisis perlu menyatakan ciri apa yang dimaksud, bukti apa yang mendukungnya, dan unsur apa yang masih berbeda. Dengan demikian, perbandingan sejarah menjadi alat memahami mekanisme, bukan analogi otomatis untuk menghakimi masa kini.

3. Italia Pascaperang: Krisis, Kemenangan yang Terasa sebagai Kekalahan

Perang Dunia I mengguncang masyarakat Eropa, tetapi dampaknya berbeda-beda. Italia bergabung dalam perang pada 1915 setelah perdebatan tajam. Kemenangan pada 1918 tidak menghasilkan rasa aman dan kemakmuran yang merata. Banyak veteran kembali ke kehidupan sipil dengan pengalaman kekerasan, harapan akan pengakuan, serta kesulitan ekonomi. Inflasi, pengangguran, konflik buruh, dan ketidakpastian politik menambah rasa bahwa pengorbanan perang tidak dibalas secara memadai. Nasionalis menyebarkan gagasan "kemenangan yang dikhianati": Italia, meskipun berada di pihak pemenang, dianggap tidak memperoleh semua wilayah dan prestise yang dijanjikan.

Ungkapan tersebut bukan deskripsi netral. Ia menyusun fakta menjadi mitos politik: bangsa digambarkan sebagai korban yang dikhianati oleh diplomat, politisi liberal, dan kelompok yang dituduh tidak patriotik. Mitos ini menyatukan kecemasan yang beragam ke dalam satu cerita tentang penghinaan dan pemulihan. Narasi itu memberi makna pada frustrasi veteran, ketidakpuasan nasionalis, dan ketakutan kelas pemilik terhadap gelombang mobilisasi buruh. Dengan demikian, krisis ekonomi berubah menjadi krisis identitas dan legitimasi.

Pada 1919–1920, Italia mengalami konflik sosial luas yang sering disebut Biennio Rosso atau "dua tahun merah". Pemogokan, pendudukan pabrik, mobilisasi petani, dan kemajuan Partai Sosialis menimbulkan harapan perubahan di kalangan pekerja serta ketakutan revolusi di kalangan pemilik tanah dan industri. Ancaman itu kadang dibesar-besarkan, terutama melalui perbandingan dengan Revolusi Rusia. Namun ketakutan politik tidak harus sepenuhnya akurat untuk menghasilkan konsekuensi nyata. Pemilik tanah dan

sebagian pengusaha membiayai atau mendukung kelompok fasis lokal yang menyerang serikat buruh, koperasi, kantor partai sosialis, dan pemerintah kota.

Dalam konteks lokal, kekerasan tidak semata-mata lahir dari kemarahan spontan. Ia dapat menjadi strategi untuk menghancurkan organisasi lawan, memulihkan kendali atas tenaga kerja, dan menunjukkan bahwa negara tidak mampu atau tidak mau melindungi lawan politik. Kajian Elazar (2000) atas provinsi-provinsi Italia menunjukkan pentingnya aliansi antara fasis dan pemilik tanah serta kolusi aparat negara dalam mengubah kekerasan anti-sosialis menjadi jalan menuju kuasa politik. Penelitian sistematis atas hubungan antara dukungan sosialis, aktivitas fasis, dan elite lokal juga menemukan bahwa organisasi pemilik tanah dan kehadiran elite lokal berperan dalam perkembangan fasisme (Acemoglu et al., 2022).

Negara liberal Italia memiliki lembaga parlementer, tetapi pemerintah rapuh dan sering berganti. Banyak elite menilai fasisme sebagai alat sementara untuk memulihkan ketertiban dan menekan kiri. Mereka menganggap gerakan itu dapat dimasukkan ke dalam sistem, diberi jabatan, dan kemudian dikendalikan. Perhitungan ini meremehkan kemampuan gerakan militan untuk memakai akses negara sambil mempertahankan kekuatan jalanan. Kekeliruan itu menunjukkan bagaimana pelaku yang tidak sepenuhnya fasis dapat membantu fasisme: bukan karena mereka mengadopsi semua gagasannya, tetapi karena menganggap ancaman dari kiri lebih besar daripada risiko menghancurkan aturan demokrasi.

Krisis sendiri tidak otomatis menghasilkan fasisme. Negara-negara lain mengalami inflasi, konflik sosial, dan veteran yang kecewa tanpa membentuk rezim fasis yang sama. Krisis menyediakan peluang dan bahasa ancaman; organisasi, pilihan elite, serta kemampuan lawan-lawan demokrasi untuk

bekerja sama menentukan apakah peluang itu menjadi kekuasaan. Analisis sebab harus menghindari determinisme yang menyatakan bahwa penderitaan ekonomi pasti memunculkan fasisme. Yang penting adalah bagaimana penderitaan ditafsirkan, siapa yang memperoleh keuntungan dari interpretasi tersebut, dan instrumen politik apa yang tersedia.

4. Dari Aktivis Politik ke Pemimpin Gerakan: Kasus Mussolini

Mussolini lahir pada 1883 dan meniti karier dalam lingkungan politik sosialis. Ia menjadi jurnalis, organisator, dan editor surat kabar Partai Sosialis Italia, Avanti!. Pada masa itu ia dikenal sebagai pembicara yang agresif dan politisi yang ambisius. Ketika perang Eropa pecah, ia mula-mula menganut sikap anti-intervensi yang sejalan dengan garis partai. Kemudian ia mendukung keterlibatan Italia dalam perang, berpisah dari posisi resmi sosialis, dan dikeluarkan dari partai. Ia membangun Il Popolo d'Italia, yang didukung jaringan pro-intervensi, dan mengembangkan politik nasionalis yang menggabungkan retorika revolusioner dengan solidaritas veteran.

Apa yang menjelaskan perubahan itu? Satu jawaban menyebut oportunisme: Mussolini melihat bahwa dukungan terhadap perang memberinya akses kepada sumber daya dan audiens baru. Penjelasan lain menyoroti pergeseran keyakinan: ia semakin menempatkan aksi, bangsa, dan kehendak politik di atas internasionalisme kelas. Kedua kemungkinan tidak saling meniadakan. Pemimpin dapat mempercayai sebagian gagasan yang ia gunakan, tetapi memilih waktu dan bentuk penyampaiannya secara strategis. Sumber sejarah menunjukkan tindakan dan pernyataan publik; menentukan motif batin dengan pasti lebih sulit.

Perubahan juga terjadi pada tingkat organisasi. Mussolini tidak sekadar menyampaikan ideologi yang sudah selesai. Gerakan yang dibentuknya menyerap berbagai kelompok: veteran, nasionalis, futuris, sindikalis nasionalis,

mahasiswa, pemilik tanah lokal, serta orang yang menolak sosialisme. Karena koalisi ini heterogen, retorika fasis dapat bersifat elastis. Satu kelompok mendengar janji revolusi nasional; kelompok lain mendengar janji ketertiban dan penghancuran serikat pekerja. Pemimpin berfungsi sebagai pusat simbolik yang memungkinkan kepentingan berbeda merasa berada dalam proyek bersama.

Di sini penting membedakan tiga lapisan perubahan. Pertama, perubahan keyakinan: apakah pemimpin semakin menerima subordinasi individu kepada bangsa, kepemimpinan tanpa pembatas, dan kekerasan sebagai metode yang sah? Kedua, perubahan strategi: apakah ia menggunakan bahasa ekstrem untuk merekrut pendukung, lalu melunakkannya ketika bernegosiasi? Ketiga, perubahan peran: apakah ia mulai bertindak sebagai simbol tak tergantikan yang mengklaim mewakili kehendak kolektif? Ketiganya dapat berjalan tidak serempak. Retorika bisa berubah lebih cepat daripada keyakinan, sementara institusi dan tindakan menyediakan bukti yang lebih kuat mengenai arah kekuasaan.

Mussolini menunjukkan bahwa pemimpin dapat masuk ke dalam fasisme dari tradisi politik yang bukan fasis. Masa lalu sosialisnya tidak berarti fasisme hanyalah bentuk sosialisme yang lain, dan tidak membuktikan bahwa semua mantan sosialis berpotensi menjadi fasis. Ia memperlihatkan bahwa krisis dapat memungkinkan perpaduan ulang unsur politik: teknik mobilisasi massa, retorika revolusioner, nasionalisme, pemujaan aksi, dan penghinaan terhadap kompromi liberal. Biografi membantu menerangkan kapasitas dan pilihan; ia tidak boleh dijadikan dalih untuk mereduksi kemunculan fasisme menjadi psikologi seorang individu.

Penelitian mengenai evolusi mitos Mussolini juga menggarisbawahi bagaimana gambaran sang Duce berubah mengikuti fase kebangkitan, krisis,

dan konsolidasi; mitos kepemimpinan tidak muncul begitu saja dari karisma alamiah, tetapi dibentuk dan dipelihara oleh pendukung, media, organisasi, serta keberhasilan simbolik yang dipentaskan (misalnya, lewat demonstrasi dan propaganda). Kultus pemimpin merupakan hubungan sosial: pemimpin menawarkan gambaran kesatuan, sedangkan para pengikut dan institusi mengulang gambaran itu sampai tampak sebagai fakta politik.

5. Psikologi Politik: Ancaman, Identitas, dan Kepatuhan

Psikologi politik dapat memperluas analisis, tetapi harus digunakan secara hati-hati. Ia tidak memberi alat untuk mendiagnosis Mussolini atau Hitler secara retrospektif dari jauh. Sebaliknya, ia membantu menjelaskan proses umum yang dapat meningkatkan daya tarik kepemimpinan otoriter: ancaman yang dirasakan, kebutuhan akan keteraturan, identifikasi dengan kelompok, kecenderungan menilai dunia melalui hierarki, dan kesediaan menyerahkan diskresi kepada pemimpin yang menjanjikan perlindungan.

Ketika masyarakat menghadapi perubahan cepat, orang tidak selalu memproses informasi politik sebagai daftar fakta yang netral. Mereka menafsirkan siapa yang menyebabkan ancaman, siapa yang layak dilindungi, dan siapa yang dianggap mengkhianati komunitas. Narasi fasis menyediakan kategori moral yang sederhana: bangsa yang murni dan bersatu berhadapan dengan musuh internal, politisi lemah, kaum asing, atau kelompok yang dituduh merusak tatanan. Pengelompokan ini mengubah konflik kebijakan menjadi konflik eksistensial. Bila lawan dilukiskan sebagai ancaman terhadap keberadaan bangsa, kompromi tampak seperti pengkhianatan.

Penelitian tentang otoritarianisme membedakan sejumlah orientasi yang sering berkorelasi tetapi tidak identik. Right-wing authoritarianism (RWA) merujuk, secara umum, pada kecenderungan mengutamakan kepatuhan kepada otoritas yang dianggap sah, konvensi kelompok, dan penghukuman

terhadap pelanggar. Social dominance orientation (SDO) menekankan penerimaan terhadap hierarki antarkelompok dan dominasi kelompok tertentu. Model ini bukan label yang dapat dilekatkan begitu saja kepada setiap pemilih atau pemimpin. Ia merupakan konstruk yang diukur dan diperdebatkan dalam penelitian, dan pengaruhnya bergantung pada konteks, identitas, serta situasi politik (Altemeyer, 1996; Duckitt, 2001; Jugert & Duckitt, 2009).

Dinamika antara pemimpin dan pengikut juga penting. Pemimpin yang dominan dapat menarik dukungan ketika kelompok merasa terancam, karena penampilan tegas memberi sinyal kemampuan bertindak cepat. Sebagian eksperimen dan survei menunjukkan bahwa ancaman kelompok dapat meningkatkan preferensi pada pemimpin dominan dalam kondisi tertentu (Laustsen & Petersen, 2017). Namun preferensi terhadap pemimpin tegas tidak otomatis berarti dukungan terhadap fasisme. Ia menjadi berbahaya ketika disertai penghapusan batas hukum, pengucilan kelompok, penolakan terhadap oposisi, dan pemuliaan kekerasan.

Konsep kepemimpinan otoriter pun perlu dibedakan dari penyakit mental. Pemimpin dapat berperilaku kejam karena ideologi, insentif organisasi, kompetisi elite, atau rasa impunitas, tanpa harus memenuhi diagnosis klinis. Menganggap kekejaman sebagai penyakit individual justru dapat mengaburkan tanggung jawab institusional dan membuat orang lain merasa kebal: seakan-akan hanya "orang gila" yang mampu menghancurkan demokrasi. Padahal, banyak perusakan institusi dilakukan oleh aktor yang memperhitungkan kepentingan, merespons insentif, dan memanfaatkan peluang.

Perubahan sikap juga dapat terjadi melalui pembelajaran bertahap. Pada awalnya, pemimpin mungkin membenarkan kekerasan sebagai pembelaan

diri, lalu menganggap intimidasi sebagai alat kampanye, dan akhirnya menggunakan kekerasan negara sebagai kebijakan rutin. Setiap langkah menghasilkan preseden dan mengubah batas yang dianggap dapat diterima. Pengikut belajar bahwa loyalitas memberi status dan akses; birokrat belajar bahwa perintah pemimpin lebih aman daripada aturan; lawan belajar bahwa penolakan terbuka membawa risiko. Kebiasaan sosial baru pun terbentuk tanpa harus ada satu keputusan tunggal yang mengubah semuanya.

Ini menjelaskan mengapa istilah "normal" menyesatkan bila dimaknai sebagai kondisi psikologis. Yang perlu dilacak adalah transisi perilaku: dari kompetisi ke intimidasi; dari kritik terhadap lawan ke dehumanisasi; dari tuntutan mandat ke klaim bahwa mandat tidak boleh dibatasi; dari kebijakan keamanan terbatas ke kekerasan sebagai sumber legitimasi. Orang yang tampak biasa dapat berpartisipasi dalam perubahan tersebut melalui keputusan-keputusan yang dibenarkan satu demi satu.

6. Mekanisme Transformasi: Dari Ambisi Menjadi Ideologi dan Rezim

Proses perubahan dapat dipetakan ke dalam rangkaian mekanisme yang saling bertaut. Urutan ini bukan hukum universal dan tidak selalu linear. Paxton (1998) mengusulkan lima tahap analitis: penciptaan gerakan; pengakaran gerakan dalam sistem politik; perebutan kekuasaan; pelaksanaan kekuasaan; dan kemungkinan radikalisasi atau pelemahan. Tidak semua gerakan melewati seluruh tahap, dan tidak ada jaminan bahwa gerakan yang muncul akan menang. Kerangka itu berguna karena memaksa kita membedakan propaganda awal dari tata pemerintahan setelah kekuasaan direbut.

Tahap pertama: krisis ditafsirkan sebagai kemerosotan bangsa. Pemimpin menghubungkan keluhan nyata—pengangguran, korupsi, ketidakamanan, inflasi, atau kebuntuan pemerintahan—dengan cerita tunggal

mengenai penghinaan dan pengkhianatan. Masalah yang berbeda-beda disederhanakan ke dalam narasi bahwa bangsa kehilangan kemurnian atau kejayaannya karena kelompok tertentu. Tahap ini bersifat interpretatif: krisis menjadi sumber dukungan karena pemimpin memberi makna dan menetapkan siapa yang harus disalahkan.

Tahap kedua: ambisi pribadi memperoleh bentuk kolektif. Ambisi tidak cukup untuk menciptakan gerakan. Pemimpin memerlukan kader, media, simbol, organisasi pemuda atau veteran, jaringan lokal, dan rutinitas yang mengubah emosi menjadi keanggotaan. Gerakan menawarkan persaudaraan, tujuan, disiplin, serta jalan menuju status bagi orang yang merasa terpinggirkan. Keanggotaan menciptakan biaya keluar: relasi sosial, reputasi, dan kesempatan ekonomi dapat bergantung pada loyalitas.

Tahap ketiga: lawan dijadikan ancaman eksistensial. Kritik terhadap kebijakan berubah menjadi tuduhan bahwa lawan bukan sekadar keliru, melainkan pengkhianat atau musuh bangsa. Polarisasi mempersempit ruang kompromi. Bila oposisi dianggap tidak sah, penindasan dapat dibingkai sebagai penyelamatan masyarakat. Kekerasan kemudian diberi narasi defensif: "kita hanya membalas" atau "negara harus memulihkan ketertiban".

Tahap keempat: kekerasan selektif membuktikan kapasitas gerakan. Serangan kepada serikat, pers, kantor partai, atau kelompok minoritas memperlihatkan bahwa gerakan dapat menghukum lawan dan melindungi pendukung. Kekerasan bukan hanya instrumen fisik; ia menyampaikan informasi tentang siapa yang berkuasa. Ketika pelaku tidak dihukum, impunitas menjadi sinyal bahwa norma hukum tidak berlaku sama bagi semua pihak. Kajian atas kekerasan paramiliter Italia menunjukkan bagaimana kekerasan mengikis ruang publik dan membuka jalan bagi perubahan rezim (Gentile, 2012).

Tahap kelima: elite mapan memberi legitimasi dan akses. Pemimpin radikal sering membutuhkan dukungan politisi konservatif, pengusaha, pemilik tanah, birokrat, militer, atau kepala negara. Para elite dapat berharap menggunakan gerakan itu untuk mengatasi kebuntuan, menghancurkan lawan kiri, atau mengonsolidasikan kekuasaan mereka sendiri. Mereka mungkin tetap tidak menyukai gaya dan sebagian gagasan pemimpin, namun menilai risiko koalisi lebih kecil daripada risiko kehilangan kendali. Inilah titik ketika ambisi pribadi menjadi ancaman sistemik.

Tahap keenam: jabatan resmi dipakai untuk melemahkan pembatas. Gerakan memperoleh posisi dalam pemerintahan, tetapi tidak menerima bahwa oposisi berhak memerintah pada masa depan. Perubahan hukum, pembubaran organisasi, penguasaan media, pemecatan pejabat yang tidak loyal, dan intimidasi terhadap parlemen dapat dilakukan secara bertahap. Bentuk legalitas tetap dipertahankan sebagai selubung, sementara makna aturan berubah: hukum tidak lagi membatasi kekuasaan, tetapi menjadi alat untuk memilih lawan dan memberi impunitas kepada pendukung.

Tahap ketujuh: rezim menggabungkan daya tarik dan paksaan. Rezim tidak bertahan dengan teror saja. Ia menyediakan simbol kebanggaan, ritual massal, kebijakan sosial tertentu, dan peluang karier bagi pendukung. Pada saat yang sama, polisi, milisi, dan birokrasi mengawasi serta menekan oposisi. Orang dapat mendukung rezim karena keyakinan, kepentingan, ketakutan, konformitas, atau kombinasi semuanya. Karena itu, dukungan yang tampak tidak boleh dibaca sebagai persetujuan bebas.

Tahap kedelapan: kemenangan memperkuat pemimpin dan mengubah organisasi. Setelah berhasil menundukkan pesaing, pemimpin dapat mengklaim bahwa keberhasilan membuktikan mandat historisnya. Loyalitas personal menggeser prosedur; keberhasilan simbolik menjadi alasan

untuk mengabaikan kegagalan kebijakan. Namun rezim juga menghadapi ketegangan: kelompok pendukung memiliki kepentingan berbeda, dan janji regenerasi menuntut kemenangan terus-menerus. Pada titik tertentu, fasisme dapat radikal, memperluas kekerasan dan ekspansi, atau melunak menjadi rutinitas birokratis yang kehilangan energi gerakannya.

Rangkaian ini menunjukkan bagaimana "perubahan pemimpin" dan "perubahan sistem" saling memengaruhi. Ambisi seorang tokoh memperoleh kemampuan memaksa melalui organisasi; organisasi mendapat akses melalui elite; institusi memberi kekuatan kepada keputusan; keputusan mengubah harapan sosial; dan lingkungan sosial baru memberi legitimasi lebih lanjut kepada pemimpin. Tidak ada satu penyebab yang cukup, tetapi beberapa penyebab menjadi kuat ketika bertemu pada waktu yang sama.

7. Kekerasan Politik dan Normalisasi yang Bertahap

Kekerasan adalah unsur sentral dalam sejarah fasisme, tetapi pembahasannya harus konkret. Ia dapat hadir sebagai kekerasan jalanan, ancaman terhadap pemilih, pembakaran kantor, pemukulan aktivis, pembunuhan politik, penahanan, penyensoran, pengusiran, dan kebijakan negara yang sistematis. Kekerasan fasis tidak semata-mata luapan emosi; ia dapat menjadi metode untuk mengubah kalkulasi orang lain. Lawan dipaksa mengurangi aktivitas, sedangkan pendukung mendapat bukti bahwa gerakan mampu melindungi mereka.

Normalisasi berlangsung ketika kekerasan diberi standar ganda. Serangan pendukung digambarkan sebagai pembelaan bangsa; perlawanan lawan digambarkan sebagai agresi yang membuktikan perlunya penindasan. Media, pejabat, dan elite dapat memperkuat standar itu dengan menyebut kekerasan sebagai "ekses" individual, padahal pola dan targetnya konsisten. Ketika

tindakan yang sama dihukum secara tidak setara, hukum kehilangan fungsi sebagai aturan umum.

Dalam Italia, kekerasan squadristi terhadap organisasi sosialis dan buruh membatasi kapasitas oposisi lokal. Penelitian Elazar (2000) menekankan kolusi aparat negara dan aliansi dengan pemilik tanah sebagai faktor penting dalam keberhasilan politik fasis. Artinya, negara bukan sekadar korban pasif dari kekerasan swasta. Polisi dan pejabat dapat memilih untuk mengabaikan, memberi perlindungan, atau menerapkan hukum secara selektif. Batas antara kekerasan gerakan dan kekuasaan negara menjadi kabur ketika aktor militan memperoleh kedekatan dengan pemerintah.

Kekerasan juga membentuk institusi di luar negara. Serikat pekerja, pers lokal, organisasi masyarakat, sekolah, dan asosiasi profesi dapat kehilangan otonomi karena ancaman terhadap anggota. Kepatuhan tidak memerlukan larangan formal bila biaya untuk berbeda pendapat sudah cukup tinggi. Dalam situasi seperti itu, warga dapat tetap hadir dalam pemilu atau menghadiri rapat umum tetapi tidak lagi memiliki pilihan yang bebas dan seimbang.

Mekanisme ini penting bagi pemahaman tentang pemimpin. Seseorang yang pada awalnya berkompetisi melalui pidato dan pemilu dapat secara bertahap menerima kekerasan karena dianggap efektif, lalu bergantung padanya. Pada awalnya kekerasan mungkin dilakukan oleh sayap gerakan; pemimpin mengingkari tanggung jawab langsung sambil menikmati hasilnya. Kemudian, saat kekuasaan terkonsolidasi, ia dapat mengintegrasikan kekerasan ke dalam aparat. Oleh karena itu, penilaian tidak boleh berhenti pada apakah pemimpin mengucapkan perintah terbuka, tetapi juga menelaah siapa yang diberi perlindungan, siapa yang dihukum, dan kebijakan apa yang memberi insentif pada kekerasan.

8. Peran Elite, Koalisi, dan Kesalahan Perhitungan

Kisah fasisme sering difokuskan pada massa yang marah atau pemimpin yang karismatik. Fokus itu kurang lengkap tanpa peran elite yang menyediakan uang, akses, dan legitimasi. Elazar (2000) menunjukkan bahwa kemenangan fasis di Italia terkait dengan koalisi pemilik tanah dan pembiaran negara terhadap kekerasan anti-sosialis. Kajian kuantitatif Acemoglu, De Feo, De Luca, dan Russo (2022) mengaitkan peningkatan dukungan sosial demokratik pascaperang dengan aktivitas fasis yang lebih tinggi dan menyoroti peran asosiasi pemilik tanah dan elite lokal. Bukti tersebut tidak berarti bahwa semua pemilik tanah atau semua elite menginginkan kediktatoran, tetapi memperlihatkan bahwa kepentingan sosial dapat membuka jalur bagi gerakan anti-demokratis.

Elite kerap melakukan kesalahan perhitungan strategis. Mereka melihat pemimpin fasis sebagai alat yang dapat dikendalikan melalui kabinet, jabatan, atau patronase. Mereka menganggap gerakan massa bisa dibubarkan setelah tugasnya selesai. Mereka percaya bahwa pemimpin akan menghormati batas konstitusi karena ia memasuki jabatan melalui prosedur resmi. Perhitungan seperti ini mengabaikan sifat kompetitif koalisi: setelah memperoleh sumber daya negara, pemimpin dapat mengurangi ketergantungan pada mitra awal dan menyingkirkan mereka.

Ada pula motif yang lebih substantif. Kelompok yang memiliki aset dan status dapat melihat demokrasi massa sebagai ancaman terhadap kepemilikan, hierarki, atau pengaruh mereka. Bila takut pada reformasi sosial, mereka dapat memilih aktor otoriter yang menjanjikan ketertiban. Dalam jangka pendek, dukungan kepada gerakan radikal mungkin tampak menguntungkan. Dalam jangka panjang, para elite dapat kehilangan kendali atas kekuatan yang mereka bantu bangun.

Koalisi fasis bukan persatuan tanpa konflik. Pemimpin, partai, aparat negara, pengusaha, gereja, militer, dan kelompok konservatif mempunyai agenda masing-masing. Rezim mengelola ketegangan melalui pembagian jabatan, kompromi terbatas, simbol bersama, dan ancaman terhadap musuh. Karena itu, keputusan pemimpin tidak selalu mencerminkan satu ideologi yang konsisten. Terkadang ia mengakomodasi satu kelompok demi dukungan; terkadang ia melakukan radikalisasi untuk mengalahkan saingan internal.

Implikasinya, perubahan seorang pemimpin harus dipelajari bersama jaringan yang memberi ganjaran atau batas. Jika kekerasan menghasilkan keuntungan politik, aparat tidak menghukum pelaku, dan elite memberikan legitimasi, strategi fasis menjadi lebih rasional bagi aktor yang mencari kuasa. Sebaliknya, penegakan hukum yang tidak memihak, koalisi demokratis yang efektif, dan penolakan elite terhadap kekerasan dapat menaikkan biaya strategi tersebut. Konteks tidak menghapus tanggung jawab individu; ia menjelaskan bagaimana tanggung jawab menjadi tindakan yang mampu mengubah negara.

9. Perbandingan Terbatas: Mussolini dan Hitler

Perbandingan Italia dan Jerman memperlihatkan kesamaan tanpa menyamakan keduanya. Keduanya mengalami akibat perang, polarisasi, konflik mengenai tatanan sosial, nasionalisme yang kuat, dan gerakan yang memuliakan persatuan serta pemimpin. Namun kondisi sosial, tradisi politik, organisasi, dan urutan perebutan kuasa berbeda. Italia menjadi tempat pertama gerakan fasis mengambil pemerintahan nasional. Jerman memiliki gerakan Nazi dengan doktrin rasial yang lebih eksplisit dan kapasitas negara yang berbeda.

Mussolini mengambil alih jabatan perdana menteri pada 1922 setelah tekanan politik yang berpuncak pada March on Rome. Ia diangkat oleh Raja Victor Emmanuel III, bukan merebut kekuasaan hanya dengan kekuatan militer yang berhasil. Setelah itu, kekerasan fasis dan kekuasaan negara berinteraksi dalam pembentukan kediktatoran pribadi. Kajian biografis terbaru menyoroti hubungan antara kekerasan skuad, dukungan elite sosial-politik, dan konstruksi Mussolini sebagai pemimpin luar biasa dalam batas kekuasaannya (lihat Ellis, 2023).

Hitler dan Partai Nazi membangun dukungan massa lebih besar melalui pemilu pada akhir Republik Weimar, dengan kemajuan signifikan di tengah Depresi Besar dan krisis pemerintahan. Tetapi ia tidak memenangkan mayoritas mutlak suara dalam pemilu bebas nasional sebelum diangkat sebagai kanselir. Penunjukannya pada Januari 1933 adalah hasil keputusan elite dan presiden Paul von Hindenburg. Setelah kebakaran Reichstag dan pemberlakuan dekret darurat, pemerintah menekan lawan dan mengesahkan Undang-Undang Pemberian Kuasa, yang memungkinkan kabinet membuat undang-undang tanpa parlemen. Prosedur hukum digunakan untuk menghancurkan kondisi yang membuat hukum demokratis bermakna.

Bila Mussolini menjadi contoh awal personalisasi kepemimpinan fasis di Italia, Hitler memperlihatkan radikalisasi yang menggabungkan negara, partai, polisi, dan proyek rasial-genosidal secara lebih ekstrem. Perbedaan tersebut mencegah kita menganggap fasisme sebagai cetak biru tunggal. Analisis harus membedakan gerakan, rezim, kebijakan, serta akibat historisnya. Persamaan yang dapat dibandingkan adalah mekanisme: penggambaran bangsa sebagai korban, mobilisasi terhadap musuh internal, kekerasan sebagai politik, aliansi dengan elite, dan pemanfaatan prosedur pemerintahan untuk meniadakan persaingan.

Penelitian tentang elite Nazi juga mengingatkan bahwa "elit" bukan kelompok homogen. Latar sosial pemimpin partai, anggota parlemen, industrialis, diplomat, akademisi, dan pejabat tinggi berbeda-beda. Analisis statistik atas lebih dari dua ribu tokoh politik dan sosial di Weimar memperlihatkan variasi latar belakang di antara pemimpin Nazi dan elite yang mempromosikan Nazisme di media, akademia, maupun birokrasi (Unger-Alvi, 2022). Ini memperkuat prinsip bahwa dukungan terhadap fasisme datang dari koalisi yang heterogen dan motif yang tidak sama.

10. Dari Jabatan ke Kediktatoran: Erosi Demokrasi

Fasisme tidak selalu menghancurkan demokrasi melalui pengumuman tunggal yang terang-terangan. Prosesnya dapat berlangsung melalui pengosongan makna institusi. Pemilu tetap diadakan tetapi lawan diintimidasi; parlemen beroperasi tetapi kewenangannya dipangkas; pengadilan tetap bersidang tetapi independensinya dirusak; media tetap terbit tetapi akses dan keselamatannya tidak setara. Perubahan bertahap membuat setiap tindakan tampak dapat diterima secara terpisah, sementara akumulasinya mengubah sistem.

Pemimpin yang berhasil menguasai agenda dapat menampilkan dirinya sebagai satu-satunya perwakilan rakyat. Konsep mandat kemudian diperluas: kemenangan dalam pemilu dianggap sebagai izin untuk melewati pembatas, sedangkan kritik institusional disebut sabotase kehendak rakyat. Ini menukar demokrasi yang berlandaskan kompetisi, hak, dan aturan dengan klaim mayoritas yang tidak terbatas. Dalam model tersebut, legitimasi tidak berasal dari prosedur yang berulang dan terbuka, tetapi dari identifikasi simbolik antara pemimpin dan bangsa.

Erosi demokrasi juga terjadi melalui pengisian jabatan. Pejabat yang setia kepada aturan dapat diganti dengan mereka yang setia kepada pemimpin.

Birokrasi kemudian mengantisipasi kehendak penguasa bahkan sebelum perintah eksplisit diberikan. Ketika karier bergantung pada loyalitas, pegawai mungkin menafsirkan instruksi secara maksimal dan menghindari keberatan. Dengan demikian, konsolidasi tidak hanya bergantung pada kekerasan, tetapi juga pada kepatuhan administratif.

Penguasaan ruang publik semakin penting. Pers yang bebas, universitas, asosiasi profesi, dan kelompok masyarakat sipil menyediakan sumber informasi serta koordinasi alternatif. Rezim dapat memaksa, membeli, memecah, atau menyerap lembaga-lembaga tersebut. Ia juga dapat menciptakan organisasi tandingan yang menampilkan partisipasi tetapi berada di bawah kendali. Mobilisasi yang tinggi bukan bukti bahwa masyarakat memiliki kebebasan politik; mobilisasi dapat diatur untuk memperlihatkan kesatuan yang telah ditentukan.

Pelajaran utama dari lintasan Mussolini dan Hitler bukan bahwa setiap demokrasi akan mengikuti jalan yang sama. Pelajarannya ialah bahwa konstitusi tertulis tidak cukup bila para pelaku menganggap norma tidak resmi, kesediaan menerima kekalahan, dan perlindungan oposisi sebagai hambatan. Demokrasi memerlukan komitmen substantif terhadap aturan yang membatasi pihak yang sedang berkuasa. Ketika elite menerima kekerasan terhadap lawan dan menormalisasi penghancuran hak demi tujuan jangka pendek, institusi formal kehilangan penyangga sosialnya.

11. Apakah Pemimpin Berubah atau Menyingkapkan Diri?

Pertanyaan “apakah pemimpin berubah?” tidak memiliki jawaban sederhana karena perubahan dapat dimaknai berbeda. Ada kemungkinan seseorang sungguh-sungguh mengubah keyakinan setelah mengalami perang atau konflik politik. Ada pula kemungkinan bahwa pemimpin sudah memiliki aspirasi otoriter tetapi baru menemukan peluang untuk

mewujudkannya. Dalam banyak kasus, keyakinan dan strategi berkembang bersama: tindakan yang awalnya dilakukan untuk memperoleh dukungan dapat kemudian membentuk keyakinan; keberhasilan membuat penggunaan kekuasaan tampak benar; dan lingkungan yang hanya menyampaikan kabar yang menyenangkan mengurangi kemampuan untuk mengoreksi diri.

Secara analitis, empat hal sebaiknya dibedakan. Pertama, biografi: pengalaman keluarga, pendidikan, pekerjaan, perang, jaringan, dan kegagalan politik. Kedua, ideologi: pernyataan dan tujuan yang diulang, terutama mengenai bangsa, kelompok luar, lawan, kekerasan, dan pembatasan kekuasaan. Ketiga, perilaku: keputusan nyata saat berhadapan dengan kritik, pemilu, hukum, atau kekerasan. Keempat, hasil institusional: apakah tindakannya memperluas atau meniadakan ruang bagi oposisi. Bukti pada empat tingkat ini tidak selalu sejalan. Karena itu, kesimpulan tentang motif hendaknya proporsional terhadap bukti.

Ungkapan "ia menjadi fasis" dapat menyamarkan agensi para pendukung. Pemimpin tidak menghasilkan kekuasaan dari ruang hampa. Ia memerlukan organisasi yang menafsirkan perintah, elite yang membuka pintu, aparat yang melaksanakan, media yang menyebarkan narasi, dan warga yang menyesuaikan diri. Pada saat yang sama, mengatakan "masyarakatlah yang membuatnya" tidak boleh membebaskan pemimpin dari tanggung jawab. Kepemimpinan fasis dicirikan oleh upaya memusatkan kehendak, memelihara kultus pribadi, dan mengarahkan kekerasan, meskipun hasilnya tetap bergantung pada struktur yang lebih luas.

Seseorang dapat tampak "normal" karena ia memiliki keluarga, berpidato dengan efektif, memahami strategi, atau mampu bernegosiasi. Kualitas-kualitas tersebut tidak mencegah tindakan anti-demokratis. Rasionalitas instrumental dapat dipakai untuk tujuan destruktif. Karena itu, penilaian moral

dan politik sebaiknya berfokus pada pilihan dan konsekuensi: apakah pemimpin menerima pembatasan yang berlaku sama bagi dirinya? Apakah ia mengakui hak lawan untuk menang dan memerintah? Apakah ia mengecam kekerasan pendukungnya secara konsisten? Apakah ia menjaga independensi lembaga? Jawaban atas pertanyaan tersebut lebih informatif daripada spekulasi tentang kepribadian tersembunyi.

Perspektif ini juga menghindari narasi deterministik mengenai "pemimpin besar". Karisma bukan zat yang dimiliki seseorang sendirian. Ia merupakan atribusi sosial yang berkembang ketika audiens memerlukan figur penyelamat, organisasi membangun citra, dan media mengulang simbol. Keberhasilan awal dapat memperkuat citra; kegagalan dapat ditutupi dengan menyalahkan pengkhianat. Kultus pemimpin dengan demikian tumbuh dari interaksi antara penampilan, kebutuhan sosial, kontrol informasi, dan institusi yang memberi panggung.

12. Kondisi yang Membuat Transformasi Lebih Mungkin

Tidak ada daftar kondisi yang dapat memprediksi secara pasti bahwa seorang pemimpin akan menjadi fasis. Namun sejarah menunjukkan beberapa faktor risiko yang berulang dan dapat dianalisis bersama.

Pertama, krisis legitimasi yang bertahan. Ketika lembaga dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah dan proses politik kehilangan kepercayaan, tawaran jalan pintas lebih menarik. Krisis harus dibaca bukan hanya dari indikator ekonomi, tetapi juga dari persepsi ketidakadilan, ketidakamanan, dan kehilangan status.

Kedua, polarisasi yang membuat lawan dipandang tidak sah. Perbedaan politik menjadi ancaman ketika kelompok menganggap pihak lain tidak

berhak memerintah. Bahasa yang menempatkan lawan sebagai musuh bangsa dapat menurunkan hambatan moral terhadap intimidasi.

Ketiga, organisasi bersenjata atau jaringan kekerasan yang memperoleh impunitas. Selama kelompok militan memahami bahwa pelanggaran akan dihukum, ancamannya dapat dibatasi. Pembiaran selektif mengubah kalkulasi dan mendorong kekerasan lebih luas.

Keempat, elite demokratis yang mengutamakan keuntungan jangka pendek. Koalisi dengan aktor ekstrem untuk mengalahkan lawan dapat memindahkan sumber daya dan legitimasi kepada gerakan yang tidak berniat menjaga pluralisme.

Kelima, media dan komunikasi yang memperkuat ekosistem informasi tertutup. Propaganda tidak harus membuat semua orang percaya pada satu klaim. Cukup bila ia membuat warga tidak sepakat pada fakta dasar, kehilangan kepercayaan kepada sumber independen, atau percaya bahwa hanya pemimpin yang dapat menentukan kebenaran.

Keenam, lemahnya organisasi sipil lintas kelompok. Serikat, asosiasi, gereja, organisasi profesi, dan komunitas lokal dapat menjadi jembatan yang mempertahankan kerja sama. Bila jaringan ini terpecah menurut identitas dan kepentingan, gerakan otoriter lebih mudah mengisolasi lawan.

Ketujuh, kesenjangan antara aturan formal dan praktik. Undang-undang demokratis tidak cukup apabila aparat menjalankannya secara selektif atau warga tidak mampu menggunakan haknya tanpa risiko. Ketahanan demokrasi bergantung pada penegakan yang konsisten.

Faktor-faktor tersebut bukan ramalan, melainkan alat untuk menilai risiko dan mengarahkan penelitian. Efeknya bisa saling menguatkan atau saling menetralkan. Krisis ekonomi dapat ditangani melalui reformasi; polarisasi dapat diredakan lewat koalisi; kekerasan dapat ditekan oleh penegakan

hukum; elite dapat memilih mempertahankan aturan. Sejarah mencakup pilihan yang tidak diambil maupun yang diambil.

13. Membedakan Fasisme dari Otoritarianisme dan Populisme

Agar konsep tidak melebar tanpa batas, fasisme perlu dibedakan dari bentuk pemerintahan yang berdekatan. Otoritarianisme secara umum membatasi kompetisi politik dan partisipasi, tetapi tidak selalu berusaha memobilisasi massa untuk regenerasi nasional. Rezim militer dapat menutup parlemen demi ketertiban dan mempertahankan hierarki; ia tidak otomatis fasis bila tidak memiliki proyek mobilisasi ultranasionalis dan transformasi masyarakat yang sepadan.

Populisme membagi masyarakat ke dalam "rakyat" dan "elite" dan mengklaim bahwa pemimpin mengekspresikan kehendak rakyat. Populisme dapat hadir di kiri atau kanan, dalam pemerintahan demokratis maupun otoriter. Ia menjadi lebih dekat dengan dinamika fasis bila dipadukan dengan nasionalisme eksklusif, mitos kemurnian dan kelahiran kembali, pengucilan kelompok, organisasi militan, pemuliaan kekerasan, serta penghapusan hak oposisi. Namun kesamaan retorika tidak cukup untuk menyatakan identitas penuh.

Konservatisme demokratis mempertahankan tradisi dan tatanan sosial melalui kompetisi politik serta perlindungan hak. Ia dapat bersekutu dengan gerakan fasis karena ketakutan terhadap kiri, tetapi juga dapat menolak fasisme demi menjaga aturan, agama, atau kebebasan. Nasionalisme pun memiliki bentuk kewargaan yang inklusif dan bentuk etnis yang eksklusif. Menilai suatu gerakan memerlukan analisis atas batas keanggotaan bangsa, perlakuan terhadap minoritas, dan penerimaan terhadap pluralisme.

Dalam sejarah, garis-garis ini tidak selalu bersih. Fasis dapat mengadopsi kebijakan sosial atau meminjam simbol dari tradisi lain. Karena itu, definisi tidak seharusnya hanya bertumpu pada program ekonomi atau identitas kelas. Paxton (1998) mengingatkan bahwa fasisme harus dipahami melalui praktik dan tahapnya, sedangkan Griffin (1991) menyoroti mitos regenerasi nasional. Pendekatan bersama memungkinkan kita bertanya apakah suatu gerakan sedang membangun kapasitas untuk meniadakan kompetisi demokratis dan mengubah masyarakat menurut hierarki nasional yang eksklusif.

14. Implikasi bagi Pendidikan, Manajemen, dan Tata Kelola

Bagi pendidikan, sejarah genesis fasisme menunjukkan pentingnya literasi sejarah dan literasi media. Peserta didik perlu belajar membedakan fakta, interpretasi, dan propaganda; mengenali cara retorika korban dan pengkhianatan bekerja; serta memahami bahwa kekerasan politik memiliki rantai tanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan tidak cukup menghafal konstitusi. Ia perlu membahas mengapa hak oposisi, kebebasan pers, dan independensi pengadilan melindungi semua warga, termasuk kelompok yang sedang tidak populer.

Bagi organisasi, termasuk perusahaan dan lembaga pendidikan, mekanisme loyalitas perlu disertai akuntabilitas. Pemimpin yang mengklaim satu-satunya sumber kebenaran dapat mengikis keberanian menyampaikan informasi buruk. Organisasi yang sehat menyediakan kanal keberatan, keputusan yang dapat diaudit, perlindungan terhadap pelapor, dan prosedur suksesi. Ini bukan analogi bahwa organisasi bisnis identik dengan negara fasis; ini pelajaran umum mengenai konsentrasi kuasa dan risiko kepatuhan tanpa koreksi.

Bagi tata kelola, pelajaran utamanya adalah menjaga netralitas penegakan hukum, membatasi konflik kepentingan, serta memastikan pejabat tidak dapat menggunakan aparat negara untuk menghukum oposisi. Kebijakan keamanan harus memiliki dasar hukum, pengawasan, batas waktu, dan mekanisme pengaduan. Institusi yang kuat tidak berarti lembaga yang kebal kritik; institusi kuat berarti lembaga yang dapat menjalankan fungsi tanpa tunduk kepada kehendak pribadi.

Pemimpin politik juga perlu dinilai melalui perilaku terhadap pembatasan. Pernyataan bahwa "rakyat menghendaki" tidak menggantikan bukti persetujuan yang bebas, berkala, dan kompetitif. Kepemimpinan demokratis dibuktikan oleh kesediaan menerima kemungkinan kalah, melindungi hak lawan, dan membiarkan lembaga independen mengoreksi keputusan. Kebajikan ini sering tampak kurang dramatis dibandingkan politik penyelamatan bangsa, tetapi menjadi infrastruktur bagi pemerintahan yang sah.

Bagi penelitian manajemen dan ilmu sosial, genesis fasisme memberikan model multilevel. Variabel pada tingkat individu—orientasi otoritarian, motivasi dominasi, persepsi ancaman—dapat dihubungkan dengan tingkat organisasi—disiplin partai, jaringan patronase, media—dan tingkat institusional—aturan pemilu, independensi peradilan, penegakan hukum. Model ini mencegah reduksi penjelasan pada karakter pemimpin saja atau, sebaliknya, pada struktur saja. Penelitian empiris dapat menelusuri proses temporal, membandingkan wilayah, dan memisahkan dukungan ideologis dari dukungan strategis atau karena takut.

15. Ekonomi Politik Fasisme: Kepentingan, Kelas, dan Janji Kerja Sama Nasional

Fasisme tumbuh dalam konflik mengenai siapa yang berhak menentukan arah ekonomi dan bagaimana konflik sosial harus diselesaikan. Ia mengkritik liberalisme parlementer sebagai lemah, tetapi tidak menghapus kepemilikan swasta secara menyeluruh. Ia menolak sosialisme internasional dan organisasi buruh independen, sembari menjanjikan kerja sama kelas di bawah kepentingan bangsa. Dalam praktiknya, seruan persatuan nasional sering membungkam tuntutan pekerja tanpa menghapus ketimpangan kekuasaan dan kepemilikan.

Janji fasis kepada kelompok sosial berbeda-beda. Kepada veteran, ia menawarkan kehormatan, solidaritas, dan peran dalam kehidupan politik. Kepada pemilik tanah, ia menawarkan penghancuran organisasi tani dan kontrol atas tenaga kerja. Kepada pengusaha, ia menjanjikan stabilitas dan pembatasan mogok. Kepada kelas menengah yang cemas, ia menawarkan status dan perlindungan dari perubahan sosial. Kepada pemuda, ia menjanjikan kebangkitan, aksi, dan peluang karier. Paket politik ini tidak konsisten dalam setiap rinciannya, tetapi dapat disatukan melalui klaim bahwa kepentingan individu harus tunduk kepada kepentingan nasional.

Hal itu menjelaskan mengapa program ekonomi fasis kadang berubah atau bertentangan. Gerakan dapat mengkritik kapitalisme finansial, kemudian menjalin kerja sama dengan pemilik modal; dapat menjanjikan perlindungan pekerja, tetapi membubarkan serikat independen; dapat mengangkat retorika revolusioner sambil mempertahankan kepemilikan bagi sekutu. Ketidakkonsistenan tersebut bukan semata-mata kesalahan penyusunan program. Ia juga merupakan hasil dari koalisi sosial yang berbeda dan tujuan membangun kekuasaan. Pemimpin mengelola ekspektasi, dan setelah

berkuasa ia dapat mengutamakan mitra yang paling diperlukan untuk mempertahankan rezim.

Kajian Acemoglu et al. (2022) atas Italia menunjukkan hubungan antara gelombang dukungan sosialis pascaperang, aktivitas fasis lokal, dan peran asosiasi pemilik tanah serta elite. Hubungan itu perlu dibaca secara cermat: penelitian empiris berusaha mengidentifikasi pola dan mekanisme pada tempat serta periode tertentu, bukan menyatakan bahwa respons terhadap sosialisme selalu menghasilkan fasisme. Namun temuan tersebut membantu menerangkan bahwa kekerasan fasis dapat mengubah keseimbangan organisasi lokal. Jika serikat dibubarkan dan koperasi dihancurkan, kelompok pekerja kehilangan kapasitas untuk berunding, sedangkan pemilik memperoleh kembali kendali. Kemenangan politik dengan demikian dapat sekaligus menjadi rekayasa hubungan industrial.

Perusahaan dan pemilik usaha juga tidak selalu bersikap sama. Sebagian mungkin mendukung gerakan karena keuntungan langsung; sebagian lain memilih netral atau berusaha menghindari gangguan; sebagian dapat menganggap gerakan militan sebagai ancaman terhadap perdagangan dan stabilitas. Yang menentukan bukan satu sikap kelas yang seragam, melainkan kemampuan gerakan memperoleh sumber daya, memecah oposisi, dan menyampaikan kepada elite bahwa ia lebih mampu menjaga kepentingan mereka daripada pemerintahan yang ada.

Fasisme memperlakukan ekonomi sebagai bagian dari proyek nasional yang lebih luas. Produksi, tenaga kerja, pendidikan, dan teknologi dapat diarahkan untuk memperlihatkan kekuatan negara dan kemandirian bangsa. Kebijakan ekonomi kemudian memiliki fungsi simbolik: proyek besar menampilkan energi dan modernitas, sementara pengorbanan warga dianggap sebagai bukti loyalitas. Dalam kondisi seperti itu, pertanyaan

mengenai efektivitas dan distribusi manfaat dapat dianggap tidak patriotik. Pengukuran kinerja harus melihat siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan apakah masyarakat dapat memperdebatkan pilihan tanpa takut.

Bagi analisis manajemen, konteks ini memberi pelajaran bahwa efisiensi organisasi tidak dapat menjadi ukuran tunggal keberhasilan. Sistem yang terkoordinasi secara kuat mungkin tampak cepat, tetapi koordinasi yang dibangun melalui pemaksaan dan penghapusan umpan balik akan menyembunyikan kegagalan. Organisasi yang meniadakan perbedaan pendapat dapat memperoleh kepatuhan sementara, namun kehilangan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki keputusan. Pengelolaan nasional melalui komando personal menghadapi masalah serupa pada skala yang jauh lebih besar: loyalitas tidak sama dengan kompetensi, dan ketakutan tidak sama dengan legitimasi.

16. Propaganda, Ritual, dan Produksi Kesatuan

Fasisme tidak hanya berusaha mengendalikan tindakan; ia berusaha membentuk cara warga membayangkan komunitas. Propaganda, ritual, simbol, seragam, lagu, arsitektur, dan demonstrasi massal memberi bentuk visual pada gagasan bahwa bangsa telah bersatu. Repetisi lambang menciptakan pengalaman emosional yang seolah-olah menyatukan peserta, meskipun kepentingan mereka berbeda. Politik menjadi pertunjukan yang menunjukkan kekuatan, kedisiplinan, dan kedekatan antara pemimpin dan rakyat.

Propaganda yang efektif tidak selalu menuntut orang menerima setiap klaim secara harfiah. Ia dapat bekerja dengan mengulang hubungan emosional antara krisis, musuh, dan penyelamat. Ketika berita buruk muncul, pendukung dapat menganggapnya sebagai serangan dari lawan; ketika

kebijakan gagal, pemimpin menyebut adanya sabotase; ketika kelompok minoritas menuntut hak, tuntutan itu digambarkan sebagai ancaman terhadap persatuan. Pola ini membuat narasi sulit dikoreksi karena setiap bukti yang berlawanan dapat dipelintir menjadi bukti konspirasi.

Media dalam konteks fasis tidak semata-mata menjadi saluran satu arah yang menyiarkan propaganda resmi. Jurnalis, penerbit, pemilik media, pembaca, dan aparat berinteraksi dalam lingkungan yang membatasi informasi. Ancaman, penyensoran, tekanan ekonomi, penguasaan saluran, serta kebiasaan mengutip sumber resmi memengaruhi isi berita. Bahkan media yang tidak secara formal dilarang dapat menyensor diri sendiri bila risiko hukum atau fisik tinggi. Dengan demikian, pengendalian informasi berlangsung melalui hukum, insentif, kepemilikan, dan ketakutan.

Ritual politik juga mengubah hubungan antara individu dan kelompok. Peserta dapat merasakan bahwa mereka hadir sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, namun pengalaman tersebut tidak serta-merta menunjukkan persetujuan yang bebas. Ada perbedaan antara partisipasi sukarela, kehadiran yang didorong tekanan sosial, dan kehadiran yang diwajibkan organisasi atau pekerjaan. Rezim dapat menggunakan angka kehadiran dan gambar kerumunan sebagai bukti dukungan, tanpa mengungkap biaya ketidakhadiran atau ketakutan untuk menolak.

Kultus pemimpin mengikat ritual itu kepada seorang figur. Pemimpin ditampilkan sebagai manusia yang memahami bangsa secara langsung, melampaui birokrasi dan partai. Kekurangan pemerintahan dapat dipisahkan dari dirinya dan disalahkan kepada pejabat buruk; keberhasilan simbolik diklaim sebagai hasil kehendaknya. Struktur ini menciptakan asimetri: pemimpin memperoleh pujian atas hasil positif dan memiliki ruang untuk menyalahkan pelaksana atas kegagalan.

Teknologi komunikasi baru tidak dengan sendirinya bersifat fasis. Media cetak, radio, film, dan sarana komunikasi masa kini dapat dipakai oleh beragam gerakan. Persoalan politiknya adalah siapa yang mengendalikan distribusi, bagaimana klaim diverifikasi, apakah warga dapat mengakses sumber alternatif, serta apakah kritik menghadapi ancaman. Analisis yang baik tidak membuat analogi teknologi secara dangkal. Ia menelaah fungsi: apakah suatu media memperkuat koordinasi oposisi atau mengisolasi kelompok, apakah ia meningkatkan transparansi atau mengaburkan tanggung jawab, dan apakah algoritme atau kepemilikan memusatkan perhatian pada figur tertentu.

Dalam pendidikan dan organisasi, propaganda memberi alasan untuk mengajarkan pemeriksaan sumber, pembacaan visual, dan analisis bahasa politik. Mahasiswa dapat diminta membandingkan bagaimana satu peristiwa diceritakan oleh sumber yang berbeda, mengenali penggunaan pasif untuk menyamarkan pelaku, serta menguji apakah sebuah klaim memiliki bukti yang dapat diverifikasi. Tujuannya bukan membuat semua peserta setuju pada kesimpulan politik yang sama, melainkan menjaga kondisi agar klaim dapat diperiksa dan perbedaan dapat dinyatakan tanpa kekerasan.

17. Metode dan Batas Penjelasan

Artikel mengenai genesis fasisme perlu menggabungkan beberapa jenis bukti. Dokumen partai dan pidato dapat menerangkan bahasa publik, tetapi tidak selalu mengungkap motif pribadi atau praktik di tingkat lokal. Surat kabar dapat menampilkan perdebatan, namun dipengaruhi sensor, kepemilikan, dan strategi editorial. Arsip pemerintah dan catatan pengadilan membantu menelusuri keputusan administratif, tetapi catatan resmi mungkin menyembunyikan tindakan informal. Data pemilu menunjukkan perubahan dukungan, tetapi tidak selalu membedakan pilihan bebas dari intimidasi.

Biografi menerangkan lintasan individu, sementara perbandingan wilayah membantu memisahkan faktor yang khas dan yang berulang.

Metode historis-komparatif yang baik tidak mencari satu variabel ajaib. Ia menyusun urutan waktu: apa yang terjadi lebih dahulu, aktor mana yang menanggapi, bagaimana insentif berubah, dan kapan suatu pilihan sulit dibalik. Urutan penting karena dukungan terhadap gerakan sebelum kekuasaan dapat berbeda dari dukungan setelah aparat dan propaganda dikuasai. Peneliti juga perlu menghindari bias hasil: karena kita mengetahui bahwa fasis menang di Italia dan Jerman, kita mudah menganggap kemenangan itu sudah pasti. Pada masanya, hasil tersebut belum ditentukan; gerakan dapat kalah, terpecah, atau dicegah.

Studi kuantitatif dapat memperkirakan hubungan antara paparan kekerasan, dukungan elektoral, dan struktur sosial. Namun pengukuran sejarah menghadapi keterbatasan data, perubahan batas administratif, dan kemungkinan sebab balik. Jika sebuah wilayah memiliki kekerasan tinggi dan dukungan fasis tinggi, kita perlu bertanya apakah kekerasan meningkatkan dukungan, apakah dukungan mendorong kekerasan, atau apakah faktor ketiga menjelaskan keduanya. Riset Acemoglu et al. (2022) dan Elazar (2000) memberi contoh bagaimana data dan bukti historis dapat dipakai bersama untuk menguji mekanisme, tetapi hasilnya tetap terikat pada konteks Italia.

Psikologi politik memiliki keterbatasan lain. Konstruk seperti RWA dan SDO biasanya diukur melalui instrumen pada populasi tertentu dan pada waktu tertentu. Skor tidak mengungkap seluruh identitas, keyakinan, atau perilaku seseorang. Hubungan statistik antara orientasi psikologis dan sikap politik tidak membuktikan bahwa orientasi tersebut menyebabkan suatu rezim terbentuk. Untuk menjelaskan sejarah, peneliti perlu menghubungkan

mekanisme individual dengan organisasi, jaringan, keputusan elite, dan aturan institusional.

Penting pula membedakan kategori emik dan kategori analitis. “Fasis” dapat menjadi sebutan yang digunakan para pelaku untuk diri mereka, nama yang diberikan lawan, atau konsep yang digunakan peneliti untuk perbandingan. Ketiga pemakaian tersebut tidak selalu identik. Gerakan bisa menolak label fasis demi memperluas dukungan, sementara lawan menggunakannya sebagai kecaman. Peneliti perlu menjelaskan kriteria klasifikasi dan menguji bukti, bukan mengandalkan nama yang dipilih aktor.

Terakhir, sejarah tidak memberi lisensi untuk meramalkan masa kini secara sederhana. Kondisi sosial, sistem komunikasi, tata negara, dan konteks internasional berubah. Perbandingan sejarah paling berguna ketika mengidentifikasi mekanisme yang mungkin berulang sambil mempertahankan perhatian terhadap perbedaan. Kita dapat mengatakan bahwa suatu tindakan menyerupai pola tertentu atau meningkatkan risiko tertentu, tanpa mengklaim bahwa seluruh proses akan mengulang jalur yang sama. Kehati-hatian ini justru memperkuat daya analitis istilah fasisme.

18. Pencegahan: Menjaga Ruang Politik Sebelum Darurat Menjadi Normal

Karena fasisme berkembang melalui proses, pencegahan tidak dapat menunggu sampai kediktatoran terbentuk. Pada tahap awal, institusi demokratis mungkin masih berfungsi, tetapi beberapa praktik dapat mengubah perilaku politik: ancaman terhadap jurnalis, pembiaran kekerasan, delegitimasi pengadilan, dan anggapan bahwa pemimpin memiliki mandat tanpa batas. Respons yang efektif perlu mengikuti tahapan tersebut dan menangani perilaku yang teramati, bukan semata-mata memperdebatkan label ideologis.

Pertama, penegakan hukum perlu konsisten terhadap kekerasan politik dari siapa pun. Jika serangan terhadap lawan dihukum hanya ketika dilakukan kelompok tertentu, negara memberi sinyal bahwa hak warga bersifat kondisional. Penegakan konsisten tidak berarti mengabaikan perbedaan motif atau konteks; artinya prosedur penyelidikan tidak ditentukan oleh kedekatan pelaku dengan pemerintah. Perlindungan terhadap demonstrasi damai, kebebasan pers, dan hak berkumpul mengurangi peluang kelompok militan memonopoli ruang publik.

Kedua, partai dan elite politik perlu menjaga pagar demokratis dalam koalisi. Negosiasi dan kompromi merupakan bagian normal demokrasi, tetapi ada perbedaan antara kompromi kebijakan dan pemberian kuasa kepada aktor yang menolak hak lawan untuk berkompetisi. Elite perlu menilai bukan hanya janji kebijakan jangka pendek, melainkan komitmen terhadap aturan, pengawasan, dan kemungkinan pergantian kekuasaan. Sejarah Italia menunjukkan bahaya menganggap gerakan kekerasan sebagai alat sementara yang dapat dikendalikan setelah memperoleh jabatan.

Ketiga, institusi independen harus memiliki kapasitas operasional dan dukungan sosial. Pengadilan, pemilihan umum, badan pengawas, universitas, pers, dan birokrasi profesional memerlukan aturan yang melindungi otonomi, pendanaan yang cukup, serta mekanisme akuntabilitas. Independensi tidak berarti tanpa tanggung jawab; ia berarti keputusan tidak dapat diubah hanya karena tidak menyenangkan pemimpin. Transparansi keputusan dan alasan yang dapat diperiksa membantu masyarakat membedakan kesalahan administratif dari penyalahgunaan sistematis.

Keempat, ketahanan demokrasi membutuhkan organisasi lintas kelompok. Serikat, asosiasi profesi, kelompok keagamaan, komunitas lokal, organisasi mahasiswa, dan lembaga pendidikan dapat menciptakan hubungan di antara

warga yang berbeda identitas. Jaringan semacam itu menyediakan ruang untuk membangun kepercayaan dan menyelesaikan konflik tanpa bergantung pada figur tunggal. Bila semua masalah harus diselesaikan melalui pemimpin yang mengklaim mewakili seluruh bangsa, masyarakat kehilangan saluran untuk menyampaikan kebutuhan yang beragam.

Kelima, negara perlu menanggapi keluhan material secara nyata. Menganggap dukungan terhadap gerakan ekstrem semata-mata sebagai akibat propaganda meremehkan kondisi yang dialami warga. Pengangguran, ketidakamanan, korupsi, dan ketimpangan dapat menjadi bahan bakar politik ketika lembaga tidak menunjukkan kemampuan untuk merespons. Kebijakan sosial yang adil tidak menjamin kekebalan dari fasisme, tetapi mengurangi kesempatan aktor otoriter mengklaim bahwa demokrasi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Keenam, pendidikan sejarah harus menyajikan proses, bukan hanya daftar diktator dan tanggal. Siswa dan mahasiswa perlu menelaah keputusan yang dibuat oleh aktor biasa: pejabat yang mengabaikan kekerasan, politisi yang menukar dukungan dengan jabatan, birokrat yang melaksanakan kebijakan diskriminatif, atau warga yang diam karena takut. Pendekatan ini menjelaskan bahwa tanggung jawab tersebar, tetapi tidak merata. Pemimpin yang memerintah memiliki kuasa dan tanggung jawab lebih besar; pengikut dan institusi tetap memiliki agensi yang berbeda-beda.

Ketujuh, respons terhadap propaganda perlu berpusat pada transparansi dan literasi, bukan sensor sewenang-wenang. Pemerintah yang mengklaim melindungi demokrasi dapat menggunakan dalih tersebut untuk membatasi kritik. Karena itu, setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, pengawasan independen, dan mekanisme keberatan. Masyarakat perlu membangun kemampuan untuk mengecek klaim, membedakan bukti dan

tuduhan, serta memahami bagaimana konten menargetkan emosi dan identitas.

Pencegahan, pada akhirnya, bukan satu intervensi teknis. Ia merupakan komitmen untuk mempertahankan kondisi yang memungkinkan warga berbeda pendapat tanpa kehilangan hak, keamanan, atau akses terhadap negara. Ketahanan demokratis tampak dalam cara pemerintah memperlakukan lawan, cara elite menanggapi kekerasan pendukung, serta cara masyarakat mempertahankan pluralisme ketika persatuan dipakai untuk membungkam. Langkah-langkah ini tidak menjamin bahwa fasisme tidak akan muncul, tetapi dapat menaikkan biaya politik dan kelembagaan bagi strategi yang meniadakan demokrasi.

19. Kontingensi Sejarah: Mengapa Fasisme Tidak Menjadi Hasil yang Pasti

Penjelasan tentang sebab tidak sama dengan pembenaran, dan menemukan kondisi yang membantu fasisme tidak berarti menganggap kemenangan fasis sebagai sesuatu yang niscaya. Perspektif kontingensi mengingatkan bahwa pada setiap tahap terdapat beberapa kemungkinan. Gerakan dapat gagal merekrut; organisasi dapat terpecah; pemerintah dapat menegakkan hukum; elite dapat menolak koalisi; lawan dapat menyusun kerja sama; dan pemilih dapat memilih pihak lain. Jika sejarah ditulis seolah-olah kemenangan sudah pasti, kita menghapus keputusan manusia yang justru perlu dipahami.

Dalam Italia, sejumlah unsur yang kemudian menyokong fasisme sudah tampak sebelum gerakan menguasai pemerintah nasional. Akan tetapi, hubungan antara unsur tersebut tidak otomatis. Perang membuka peluang bagi mobilisasi veteran, tetapi veteran tidak semuanya menjadi fasis. Konflik buruh memicu kecemasan pemilik, tetapi tidak setiap konflik melahirkan

kekerasan anti-demokratis. Popularitas nasionalisme tidak serta-merta berarti dukungan terhadap penghapusan parlemen. Peluang baru berubah menjadi jalan menuju rezim ketika aktor tertentu menghubungkan unsur-unsur itu melalui organisasi, kekerasan, dan koalisi.

Kegagalan demokratis pun tidak selalu bersumber dari kurangnya dukungan masyarakat. Ada kemungkinan pemerintah kehilangan legitimasi karena tidak menyelesaikan kebutuhan publik, tetapi juga ada kemungkinan pemerintah gagal karena elite menolak melakukan kompromi yang diperlukan atau sengaja menggunakan konflik untuk membatasi partisipasi. Analisis perlu menanyakan siapa yang memiliki kuasa untuk mengubah kebuntuan, siapa yang mendapat keuntungan dari kebuntuan, dan siapa yang dibebani konsekuensi.

Perbandingan membantu menguji kontingensi. Apabila gerakan serupa muncul dalam beberapa tempat tetapi hanya sebagian memperoleh akses ke pemerintah, kita dapat menelaah perbedaan dalam sistem pemilu, koalisi elite, organisasi buruh, kapasitas negara, serta perilaku aparat. Kasus yang gagal sama pentingnya dengan kasus yang berhasil karena menunjukkan kondisi penghambat. Kita sebaiknya tidak hanya meneliti "mengapa fasisme menang", tetapi juga "mengapa di tempat tertentu gerakan gagal atau tetap berada di pinggir".

Kontingensi juga menghindarkan penggunaan istilah fasisme sebagai ramalan. Menemukan retorika nasionalisme, kepemimpinan dominan, atau serangan terhadap lawan merupakan alasan untuk meneliti lebih lanjut, bukan bukti bahwa sejarah sedang mengulang diri secara mekanis. Kategori analitis harus menguji apakah gerakan memiliki kemampuan organisasi, hubungan dengan elite, penerimaan terhadap kekerasan, dan tujuan untuk meniadakan

pluralisme. Sebuah proses dapat mengandung risiko tanpa mencapai hasil akhir yang sama dengan rezim Italia atau Jerman.

Dimensi moral dari kontingensi adalah bahwa warga dan pejabat mempunyai kewajiban untuk menilai pilihan saat ini berdasarkan akibat yang dapat diperkirakan, bukan berdasarkan klaim bahwa "tidak ada alternatif". Retorika keadaan darurat sering menutup ruang pertimbangan dengan menyatakan bahwa tindakan luar biasa satu-satunya jalan. Namun justru dalam situasi krisis, masyarakat perlu membandingkan pilihan, memeriksa bukti, dan mempertahankan batas yang mencegah konsentrasi kuasa tidak terkendali.

Bagi penelitian, perspektif ini mengarahkan perhatian pada mekanisme yang dapat diubah. Bila faktor pentingnya adalah impunitas, maka penegakan hukum mungkin menjadi titik intervensi. Bila faktor pentingnya adalah fragmentasi oposisi, organisasi lintas kelompok dapat mengurangi kelemahan tersebut. Bila dukungan muncul dari ketidakamanan ekonomi, kebijakan responsif dapat mengurangi daya tarik janji penyelamatan yang eksklusif. Tidak satu pun tindakan tunggal cukup; namun masing-masing dapat mengubah kalkulasi aktor dan mencegah pertemuan faktor risiko pada saat yang sama.

20. Indikator Analitis untuk Membaca Perubahan Kepemimpinan

Untuk mengubah pembahasan historis menjadi kerangka analitis yang dapat digunakan dalam penelitian, perubahan kepemimpinan dapat diamati melalui beberapa dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama ialah cara pemimpin mendefinisikan komunitas politik. Apakah keanggotaan bangsa dipahami secara kewargaan dan terbuka, atau dibatasi oleh identitas yang dianggap murni? Apakah warga yang berbeda pandangan tetap diakui sebagai bagian dari masyarakat, atau ditempatkan di luar bangsa?

Dimensi kedua ialah cara pemimpin memandang oposisi. Dalam demokrasi, lawan dapat salah, bahkan kebijakannya dapat ditolak keras, tetapi ia tetap memiliki hak untuk berkampanye, berbicara, dan berusaha menang. Perubahan berbahaya terjadi ketika oposisi disebut pengkhianat, subversif, atau musuh yang tidak berhak berada di ruang publik. Peneliti dapat mengamati bukan hanya pidato, melainkan juga konsekuensi nyata bagi organisasi, media, dan warga yang dikategorikan sebagai lawan.

Dimensi ketiga adalah sikap terhadap kekerasan pendukung. Pernyataan pemimpin perlu dibandingkan dengan tindak lanjut: apakah kekerasan diselidiki secara independen, apakah pelaku dihukum, apakah korban mendapat perlindungan, dan apakah aparat menerima arahan untuk menerapkan hukum setara? Kecaman simbolik yang tidak diikuti tindakan dapat berfungsi sebagai penyangkalan yang memberi ruang kepada pelaku.

Dimensi keempat adalah hubungan pemimpin dengan pembatas institusional. Ia dapat mengkritik lembaga dan mengusulkan reformasi; kritik terhadap lembaga tidak otomatis anti-demokratis. Indikator pentingnya ialah apakah perubahan memperkuat akuntabilitas umum atau mengalihkan kendali kepada dirinya sendiri. Perubahan aturan pemilu, pengawasan pengadilan, pengangkatan pejabat, dan penggunaan keadaan darurat perlu dianalisis berdasarkan distribusi kuasa sebelum dan sesudahnya.

Dimensi kelima adalah struktur organisasional di sekitar pemimpin. Kultus personal dapat berkembang bila partai kehilangan mekanisme internal untuk mengoreksi, bila kader hanya bertanggung jawab kepada figur, dan bila akses terhadap sumber daya bergantung pada loyalitas. Aspek ini menunjukkan bahwa kecenderungan pemimpin tidak selalu cukup untuk membentuk rezim; ia harus didukung jaringan yang mampu menerjemahkan kehendak menjadi tindakan.

Penilaian harus bersifat kumulatif dan longitudinal. Satu pidato provokatif mungkin tidak cukup untuk klasifikasi, tetapi perubahan berulang pada retorika, kebijakan, perlakuan terhadap oposisi, dan fungsi lembaga dapat menunjukkan arah yang lebih jelas. Analisis longitudinal juga membantu membedakan retorika kampanye dari praktik pemerintahan serta melihat apakah sebuah perubahan bersifat sementara atau menjadi pola.

Kerangka indikator tersebut tidak dimaksudkan sebagai skala klinis untuk menyebut individu "fasis" berdasarkan skor. Ia adalah panduan untuk menyusun pertanyaan dan mengumpulkan bukti. Penelitian dapat mengodekan pidato dari waktu ke waktu, membandingkan kebijakan dan pelaksanaan, menelusuri sanksi hukum, menganalisis jaringan dukungan, serta menguji bagaimana warga memaknai ancaman. Penggunaan berbagai sumber mengurangi risiko bahwa peneliti mengandalkan satu kutipan atau satu peristiwa yang dipilih karena mendukung kesimpulan awal.

Dengan cara itu, konsep fasisme menjadi lebih berguna bagi ilmu sosial dan pendidikan. Ia membantu menamai kombinasi praktik yang mengarah pada penghapusan pluralisme, tanpa menjadikan label sebagai pengganti analisis. Penggunaan konsep yang bertanggung jawab menuntut keterbukaan terhadap bukti yang menguatkan maupun melemahkan klasifikasi, serta kesediaan membedakan kesamaan mekanisme dari kesamaan historis penuh.

21. Kesimpulan: Fasisme sebagai Proses Pilihan yang Diperkuat Sistem

Genesis fasisme tidak dapat dijelaskan sebagai metamorfosis misterius seorang individu yang semula "normal" menjadi monster. Sejarah Mussolini menunjukkan bahwa aktor politik dapat berangkat dari tradisi yang berbeda, memanfaatkan perang dan konflik, membangun organisasi baru, lalu menyusun nasionalisme eksklusif dan kepemimpinan pribadi. Namun transformasi itu memperoleh daya ketika krisis sosial dibingkai sebagai

penghinaan bangsa, kekerasan digunakan untuk menghancurkan oposisi, elite menganggap gerakan militan dapat dikendalikan, dan aparatur negara menerapkan aturan secara selektif.

Fasisme juga bukan hasil otomatis dari krisis. Masyarakat menghadapi krisis dengan respons yang beragam. Gerakan fasis tumbuh ketika narasi kemerosotan menemukan audiens, organisasi mampu mengubah emosi menjadi disiplin, lawan demokratis terpecah, dan koalisi elite membuka jalan ke negara. Begitu berada dalam pemerintahan, prosedur formal dapat dipakai untuk menyingkirkan pembatas, sedangkan kekerasan dan propaganda mengubah kondisi kompetisi politik.

Psikologi politik membantu menjelaskan mengapa janji ketertiban, kesatuan, dan pemimpin dominan dapat terasa menarik di tengah ancaman. Namun ia tidak boleh menjadi diagnosis retrospektif atau alasan untuk melupakan institusi. Kecenderungan otoritarian, bila ada, tidak dengan sendirinya menghasilkan fasisme; ia menjadi signifikan melalui organisasi, identitas kelompok, kebijakan, serta peluang kekuasaan. Begitu pula ambisi pribadi tidak akan cukup tanpa dukungan, pembiaran, dan sumber daya.

Karena itu, jawaban yang paling cermat terhadap pertanyaan judul adalah: seorang pemimpin bergerak menuju fasisme melalui serangkaian pilihan yang makin menerima eksklusivisme, kekerasan, pemujaan pemimpin, dan penghapusan batas konstitusional; pilihan itu diperkuat oleh gerakan dan elite yang memperoleh manfaat darinya, lalu dilembagakan melalui negara. Perubahan dapat berakar pada keyakinan, kalkulasi, atau keduanya. Yang dapat dinilai secara publik adalah pola ucapan, tindakan, perlindungan yang diberikan, dan institusi yang ditinggalkan.

Studi sejarah tidak memberi formula mekanis untuk mengidentifikasi setiap ancaman masa kini. Ia memberi pertanyaan yang perlu diajukan lebih

awal: apakah lawan masih dianggap warga yang sah? Apakah kekerasan pendukung dihukum? Apakah pemimpin menerima pembatasan yang berlaku bagi dirinya? Apakah elite menolak menggunakan gerakan anti-demokratis sebagai alat? Apakah warga memiliki informasi dan organisasi yang independen? Jawaban yang jujur atas pertanyaan-pertanyaan itu dapat membantu masyarakat mempertahankan demokrasi sebelum kerusakan menjadi sulit dipulihkan.

Glossarium

Autoritarianisme — Sistem atau kecenderungan politik yang membatasi pluralisme, kompetisi, dan partisipasi, serta memusatkan kuasa pada pemimpin atau kelompok kecil.

Biennio Rosso — "Dua tahun merah" (1919–1920), periode konflik buruh dan petani yang intens di Italia setelah Perang Dunia I.

Elit tradisional — Kelompok mapan seperti pemilik tanah, pengusaha, militer, birokrat, dan politisi konservatif yang memiliki sumber daya serta akses institusional.

Fasisme — Gerakan atau rezim ultranasionalis yang menjanjikan regenerasi bangsa melalui kesatuan, kepemimpinan dominan, mobilisasi massa, pengucilan lawan, dan legitimasi kekerasan; definisi dan batasnya diperdebatkan dalam literatur.

Kultus pemimpin — Pembentukan citra pemimpin sebagai figur luar biasa dan perwujudan bangsa, yang dipelihara melalui propaganda, ritual, organisasi, dan dukungan sosial.

Mitos kelahiran kembali — Narasi bahwa bangsa telah merosot atau dipermalukan dan hanya dapat pulih melalui mobilisasi radikal serta pembaruan kolektif.

Otoritarianisme sayap kanan (RWA) — Konstruk psikologi politik yang meneliti kecenderungan pada kepatuhan terhadap otoritas, konvensi kelompok, dan penghukuman pelanggar; bukan diagnosis klinis.

Paramiliter — Organisasi bersenjata atau semi-militer di luar struktur militer reguler yang menggunakan disiplin dan kekerasan untuk tujuan politik.

Regenerasi nasional — Proyek pembaruan bangsa yang menggambarkan perubahan politik sebagai pemulihan kejayaan, kemurnian, atau vitalitas kolektif.

Social dominance orientation (SDO) — Orientasi psikologis yang berkaitan dengan penerimaan terhadap hierarki dan dominasi antarkelompok.

Ultranasionalisme — Nasionalisme intens yang menempatkan bangsa sebagai nilai tertinggi, sering disertai klaim keunggulan dan penolakan terhadap pluralisme atau hak setara kelompok lain.

Erosi demokrasi — Pelemahan bertahap terhadap kompetisi, kebebasan sipil, independensi lembaga, dan aturan yang memungkinkan pergantian kekuasaan.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., De Feo, G., De Luca, G. D., & Russo, G. (2022). War, socialism, and the rise of fascism: An empirical exploration. *The Quarterly Journal of Economics, 137*(2), 1233–1296. https://doi.org/10.1093/qje/qjac001

Altemeyer, B. (1996). *The authoritarian specter*. Harvard University Press.

Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. *Advances in Experimental Social Psychology, 33*, 41–113. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(01)80004-6

Elazar, D. S. (2000). Class, state, and counter-revolution: The fascist seizure of power in Italy, 1919–1922. *European Sociological Review, 16*(3), 301–321. https://doi.org/10.1093/esr/16.3.301

Ellis, S. (2023). *Duce: The contradictions of power: The political leadership of Benito Mussolini*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197696132.001.0001

Gentile, E. (2012). Paramilitary violence in Italy: The rationale of fascism and the origins of totalitarianism. In R. Gerwarth & J. Horne (Eds.), *War in peace: Paramilitary violence in Europe after the Great War* (pp. 85–104). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199654918.003.0006

Griffin, R. (1991). *The nature of fascism*. Routledge.

Jugert, P., & Duckitt, J. (2009). A motivational model of authoritarianism: Integrating personal and situational determinants. *Political Psychology, 30*(5), 693–719. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2009.00722.x

Laustsen, L., & Petersen, M. B. (2017). When the appeal of a dominant leader is greater than a prestige leader. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 114*(26), 6734–6739. https://doi.org/10.1073/pnas.1617711114

Mussolini, B. (1933). The political and social doctrine of fascism. *The Political Quarterly, 4*(3), 341–356. https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.1933.tb02289.x

Paxton, R. O. (1998). The five stages of fascism. *The Journal of Modern History, 70*(1), 1–23. https://doi.org/10.1086/235001

Paxton, R. O. (2004). *The anatomy of fascism*. Alfred A. Knopf.

Passmore, K. (2021). What is fascism and where does it come from? *History Workshop Journal, 91*(1), 1–28. https://doi.org/10.1093/hwj/dbab003

Unger-Alvi, S. (2022). The social backgrounds of Nazi leaders: A statistical analysis of political elites in Weimar Germany, 1918–1933. *Journal of Historical Sociology, 35*(3), 354–371. https://doi.org/10.1111/johs.12370